

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pembangunan dalam negeri yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah perwujudan dari cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Didalamnya tertuang harapan untuk dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu aspek dalam pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup setiap generasi, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan. Secara umum, pendidikan di Indonesia dihadapkan pada tantangan mutu yang harus dapat dibandingkan dengan berbagai negara lainnya. Untuk dapat bersaing secara global, maka Indonesia perlu meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pendidikan. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan SDM dalam bidang pendidikan adalah dengan meningkatkan mutu pada tenaga pendidik yang ada. Tenaga pendidik yang termasuk ke dalam komponen proses untuk meningkatkan mutu pendidikan, bersama dengan segala metode dan bahan ajar, sistem evaluasi dan administrasi, hingga sarana penunjang, sangat perlu untuk mengalami peningkatan (Mukhid, 2007).

*World Economic Forum* pada tahun 2017 mengeluarkan data *Global Human Capital Report* yang menunjukkan mutu sumber daya manusia negara-negara di dunia, dan Indonesia berada pada peringkat 65 dari 130 negara. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Sedangkan untuk mutu tenaga pendidik, UNESCO menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 14 dari 14 negara. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, Indonesia perlu lebih dulu meningkatkan mutu sumber daya manusianya yang berprofesi sebagai tenaga pendidik. Rendahnya mutu tenaga pendidik nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari internal, maupun eksternal. Faktor internal yang

mendukung rendahnya mutu tenaga pendidik, antara lain yaitu banyaknya tenaga pendidik yang kurang menguasai teknologi (kurangnya *skill*) serta ketidaksesuaian latar pendidikan terhadap bidang pengajaran (Makhmudah, 2016).

Kurang memadainya tata kelola tenaga pendidik yang dilakukan oleh pemerintah menjadi faktor eksternal yang turut mempengaruhi. Seperti, rata-rata pendapatan yang dimiliki oleh para tenaga pendidik yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain dengan adanya tunjangan profesi. Hal ini kemudian menyebabkan tingginya tingkat rekrutmen tenaga pendidik dalam satu dekade terakhir. Namun, rekrutmen yang dilakukan justru mengesampingkan kompetensi yang dimiliki SDM terkait, yang bahkan cenderung tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pendidik sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang minimal harus selesai menempuh bidang pendidikan jenjang D4 atau S1 (Nugroho, 2019).

Berawal dari tidak kompetennya SDM yang direkrut sebagai tenaga pendidik, hal itu kemudian merambat pada sistem pengajaran dan aspek lainnya. Seperti pembelajaran yang monoton karena terpaku pada *text book*, minimnya interaksi timbal balik antara pengajar dan murid karena hanya terfokus pada penjelasan satu arah dari pengajar, dan pembelajaran menjadi tidak efektif karena pengajaran yang monoton membosankan bagi para murid. Selain itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, rendahnya mutu tenaga pendidik di Indonesia juga disebabkan oleh kompetensi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Latar belakang pendidikan yang ditempuh terkadang tidak sesuai dengan bidang pengajar yang dilakoni oleh para tenaga pendidik yang telah direkrut. Hal inilah yang kemudian menyebabkan tenaga pendidik menjadi tidak maksimal dalam mengkomunikasikan bahan ajarnya dengan baik untuk dapat dimengerti oleh para murid. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk dapat mengupayakan suatu hal yang dapat meningkatkan mutu bagi tenaga pendidik di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu bagi tenaga pendidik di Indonesia adalah dengan

mengadakan standarisasi kompetensi (kualifikasi) dan sertifikasi bagi tenaga pendidik dalam negeri. Standarisasi kualifikasi digunakan sebagai pengukur kemampuan tenaga pendidik sesuai pada tingkatan dan jabatan. Hal ini dibutuhkan untuk menyesuaikan kemampuan dengan bidang ajar pendidik tersebut. Sedangkan, sertifikasi atau pemberian sertifikat dilakukan kepada pengajar yang telah memenuhi standar profesional pendidik, dan dijadikan sebagai bukti formal sesuai yang tertuang dalam Undang-undang (Daeng, 2013).

Namun begitu, program sertifikasi ini belum diterapkan secara maksimal di Indonesia. Pasalnya, per-tahun 2019, direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menyatakan bahwa jumlah tenaga pendidik nasional mencapai angka 3 juta. Adapun perincian jumlah tenaga pendidik adalah sebagai berikut, yaitu PNS sebesar 1.607.480, pegawai tetap yayasan sebanyak 458.463, pegawai tidak tetap provinsi sebesar 14.833, pegawai tidak tetap kota sebesar 190.105, guru bantu pusat 3.829, guru honorer sekolah 728.461, dan status lainnya 354.764 (Jaringan Pemberitaan Nusantara Negeriku, 2019). Dari total 3 juta jumlah tenaga pendidik, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) menyatakan bahwa jumlah tenaga pendidik yang belum memiliki sertifikasi masih cukup tinggi, yaitu sekitar 1,6 juta tenaga pendidik. Hal itu berarti sekitar 50% dari jumlah tenaga pendidik di Indonesia belum memiliki sertifikasi (Agustina, 2019). Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan mampu menciptakan upaya dan kebijakan yang mendukung peningkatan tenaga pendidik bermutu yang memiliki sertifikasi, sehingga kebijakan ini kedepannya dapat diimplementasikan dengan lebih baik. Selain itu, jumlah tenaga pendidik di Indonesia juga perlu untuk ditingkatkan. Meskipun saat ini sudah mencapai angka 3 juta, namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa pada akhir tahun 2018, jumlah kekurangan tenaga pendidik mencapai 90.072, karena banyaknya tenaga pendidik yang pensiun. Tahun ini, sekitar 2.231 tenaga pendidik berkurang, dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2023 (Ramadhan, 2020). Hal ini kemudian menyebabkan

Indonesia terus kekurangan jumlah tenaga pendidik, dan perlu untuk meningkatkannya.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) sendiri merupakan program pembangunan Global milik PBB yang dapat diadopsi menjadi program pembangunan dalam negeri. Agenda yang terdapat dalam SDGs, kemudian dapat dijadikan acuan dan referensi bagi Indonesia dalam melakukan pembangunan nasional. Target 4.c terkhususnya, merupakan target dalam pendidikan berkualitas yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah guru bermutu secara substansial, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya negara dengan tingkat pembangunan rendah dan negara berkembang dari pulau kecil (SDGs, 2017).

Sama halnya dengan Indonesia, Korea Selatan juga memiliki berbagai tujuan dalam negeri yang sejalan dengan target-target yang ingin dicapai dalam SDGs. Bahkan, Korea Selatan secara gamblang menyerapnya dalam bentuk tujuan pembangunan nasional atau biasa dikenal dengan *Korea Sustainable Development Goals* (KSDGs). Dalam pembukaan *Incheon Declaration and Framework for Action: for the Implementation of Sustainable Development Goal 4* pada tahun 2016, pada poin ke-9 terkait *South Korea's New Vision for Education* dinyatakan bahwa:

*“We commit to **quality education** and to improving learning outcomes, which requires strengthening inputs, processes and evaluation of outcomes and mechanisms to measure progress. We will ensure that **teachers and educators** are empowered, adequately recruited, welltrained, professionally qualified, motivated and supported within well-resourced, efficient and effectively governed systems. We also stress the importance of human rights education and training in order to achieve the post-2015 sustainable*

*development agenda.*” (UNESCO, Incheon Declaration and SDG4: Education 2030 Framework for Action., 2016).

Dengan demikian, Korea Selatan menyatakan bahwa mereka memiliki fokus terhadap mutu pembelajaran dalam negeri mereka. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Korea Selatan adalah dengan memastikan adanya regulasi dan kebijakan yang tepat terkait tenaga pendidik yang berkualifikasi, tereduksi, dan terlatih dengan baik. Dengan begitu, tenaga pendidik yang dipekerjakan adalah mereka yang dapat mendukung kualitas sumber daya manusia dan sistem edukasi dalam negeri menjadi lebih baik. Sebagai perwujudan dalam memenuhi strategi mereka, kementerian pendidikan Korea Selatan mengupayakan kurikulum nasional mereka untuk dapat mengikuti *Global Citizenship Education and Programme* dan mengokohkan pelatihan terhadap pendidik untuk dapat memenuhi hal tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah Korea Selatan melakukan kolaborasi dengan *Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU)* agar dapat mewujudkan upaya-upaya tersebut pada sistem pendidikan nasional dalam negeri mereka (UNESCO, *Beyond Commitments: How Countries Implement SDG 4.*, 2019).

Pada tahun 2014, Korea Selatan bahkan mampu menempati posisi pertama pada Peringkat indeks pendidikan negara-negara di dunia yang dibuat oleh The Learning Curve – Pearson PLC. Dalam bidang pendidikan, profesi pendidik bagi Korea Selatan merupakan salah satu profesi yang sangat penting. Oleh sebab itu, pemerintah Korea Selatan sangat mempersiapkan secara matang upaya untuk mendapatkan jajaran pengajar yang profesional dan berkualitas. Hal itu kemudian didukung dengan komponen dalam bidang pendidikan lainnya, sehingga Korea Selatan berhasil menempati posisi pertama dalam tingkat indeks sistem pendidikan antar negara. Oleh sebab itu, melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan Korea Selatan merupakan salah satu kesempatan baik bagi

Indonesia, mengingat tingginya peringkat yang dimiliki oleh Korea Selatan dalam bidang terkait (Kurniawan, 2017).

Selain itu, Korea Selatan juga merupakan salah satu *partner* kerjasama strategis yang dimiliki oleh Indonesia dalam berbagai bidang. Seperti pada bidang ekonomi, Indonesia dan Korea Selatan memiliki hubungan yang sangat baik. Salah satunya adalah perundingan dagang IK-CEPA atau perundingan Perjanjian Kemiteraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea Selatan, dimana melalui perjanjian ini, Indonesia dapat memiliki akses pasar yang lebih baik di pasar Korea Selatan untuk berbagai produk seperti industri, perikanan, dan pertanian. Dalam bidang perdagangan, Korea Selatan merupakan negara tujuan ekspor dan sumber impor keenam terbesar bagi Indonesia, dengan total nilai perdagangan kedua negara mencapai 18,62 miliar USD pada tahun 2018 dan menyebabkan surplus sebesar 460 juta USD bagi Indonesia. Selama tahun 2014-2018, Korea Selatan juga tercatat sebagai investor asing terbesar di Indonesia dengan total investasi sebesar 7 miliar USD dalam berbagai bidang, seperti industri makanan, tekstil, kimia dan farmasi, logam, mesin, dan elektronik (KEMENDAG, 2019).

Selain dalam bidang perdagangan dan investasi, Korea Selatan juga berkontribusi bagi pariwisata Indonesia. Jumlah wisatawan Korea Selatan ke Indonesia yang tercatat oleh Kementerian dan Kebudayaan RI pada tahun 2018 mencapai angka 358.885 ribu orang. Semakin banyaknya media Korea Selatan yang menjadikan wilayah di Indonesia sebagai tempat syuting *variety show* dan liputan TV lokal Republik Korea diperkirakan akan dapat meningkatkan jumlah kunjungan dalam beberapa tahun mendatang. Dalam hal ini, kedua negara saling mendorong dalam mempromosikan dan meningkatkan laju wisatawan satu sama lain melalui pertukaran pengalaman, kunjungan studi lapangan atau studi banding, dan lainnya. Lalu, dalam bidang pendidikan, kedua negara biasa melakukan pertukaran pelajar, tenaga pendidik, peneliti, dan ahli; pertukaran informasi dan bahan-bahan penelitian; mengadakan pertemuan berkala seperti konferensi dan

seminar; serta melakukan pelatihan, dan mendirikan pusat riset bersama (KEDUBES RI, 2019).

Dalam kerangka kerjasama bilateral, *Korea International Cooperation Agency* (KOICA) merupakan salah satu lembaga pengelola atau penyalur bantuan milik Korea Selatan yang cukup berperan dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Pada 17 Mei 2019, KOICA menyatakan akan meningkatkan dana bantuan pengembangan resmi (ODA) sebesar dua kali lipat di tahun 2023 terhadap 6 negara di ASEAN, termasuk Indonesia (Internasional, 2019). Selama beroperasi di Indonesia, beberapa agenda KOICA di Indonesia antara lain, yaitu mengadakan proyek pembangunan *Green School* dengan UNESCO, dimana KOICA mengalirkan dana sebesar 700.000 USD untuk membangun sekolah dasar di kota Banjarmasin sebagai bentuk peningkatan fasilitas pendidikan di wilayah berkembang. Selain mengadakan pembangunan sekolah, KOICA juga mengirim tenaga sukarela, sekaligus bantuan alat pengajaran, seperti komputer. Dalam proyek ini, KOICA juga menyediakan dana sebesar Rp 100-150 juta untuk mengadakan pembangunan sarana-prasarana di wilayah Sulawesi Selatan. Bantuan juga dikerahkan oleh KOICA pada tahun 2013 dengan menghibahkan gedung beserta isinya, serta pelatihan tenaga ahli yang jika dirupiahkan mencapai RP 55 milyar untuk dijadikan sebagai gedung pusat keamanan *cyber* di Institut Teknologi Bandung (ITB) (Ajeng Dwi Jayanti, 2017). Secara tidak langsung, luasnya bidang kerjasama dan besarnya kontribusi Korea Selatan bagi Indonesia melalui hubungan berbagai bentuk kerjasama yang terjalin tersebut menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara yang memiliki hubungan penting dengan Indonesia.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia disebabkan oleh rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang berprofesi sebagai tenaga pendidik. Hal tersebut dibuktikan melalui rendahnya peringkat Indonesia dalam data yang dibuat

oleh *World Economic Forum* pada tahun 2017 yang menunjukkan mutu sumber daya manusia negara-negara di dunia dalam *Global Human Capital Report*, dan Indonesia berada pada peringkat 65 dari 130 negara. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Sedangkan untuk mutu tenaga pendidik, UNESCO menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 14 dari 14 negara. Kurangnya *skill*, latar belakang pendidikan tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan bidang ajar, kurang memadainya tata kelola guru oleh pemerintah, serta kurang mengikatnya kebijakan dengan peningkatan mutu yang diharapkan menjadi penyebab rendahnya mutu tenaga pendidik di Indonesia.

Dalam hal ini, Indonesia perlu mengadakan kerjasama dengan negara mitra yang memiliki rekam jejak yang baik dalam bidang pendidikan. Salah satunya, adalah Korea Selatan. Berbanding terbalik dengan Indonesia, Korea Selatan memiliki mutu yang sangat baik pada bidang terkait. Hal itu ditunjukkan dengan tingginya peringkat Korea Selatan yang bahkan mampu menempati posisi pertama pada Peringkat indeks pendidikan negara-negara di dunia yang dibuat oleh The Learning Curve – Pearson PLC pada tahun 2014. Tingginya peringkat mutu pendidikan Korea Selatan dan baiknya hubungan antar kedua negara menjadi latar belakang terbentuknya kerjasama pendidikan yang terjalin di antara keduanya. Dalam bidang pendidikan, kedua negara biasa melakukan pertukaran pelajar, tenaga pendidik, peneliti, dan ahli; pertukaran informasi dan bahan-bahan penelitian; mengadakan pertemuan berkala seperti konferensi dan seminar; serta melakukan pelatihan, dan mendirikan pusat riset bersama. Untuk dapat meningkatkan mutu tenaga pendidik, pelatihan tenaga pendidik merupakan hal mendasar dan sangat dibutuhkan. Selain itu pertukaran tenaga pendidik dengan Korea Selatan juga diharapkan mampu untuk mewujudkannya.



Oleh sebab itu, penulis memutuskan adapun pertanyaan penelitian dalam karya tulis ini adalah “*Bagaimana implementasi kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam upaya memenuhi target 4.c Sustainable Development Goals (SDGs) melalui program pertukaran dan pelatihan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik?*”

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini, yaitu: (1) menganalisis upaya Indonesia dan Korea Selatan dalam memenuhi target Sustainable Development Goals (SDGs), terkhususnya target 4.c di negara masing-masing, dan (2) menganalisis implementasi kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam upaya meningkatkan mutu tenaga pendidik, melalui program pertukaran dan pelatihan tenaga pendidik.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat luas terkait upaya peningkatan mutu tenaga pendidik yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana korelasinya dengan SDGs, khususnya terkait target 4.c tentang upaya meningkatkan jumlah tenaga pendidik bermutu. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi akademik bagi para individu yang akan melakukan penelitian lainnya di masa yang akan datang.

#### **b. Manfaat Praktis**

Melalui hubungan kerjasama antar pemerintah Indonesia dan Korea Selatan, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi setiap pengambil kebijakan, baik Kementerian, Lembaga, maupun kelompok masyarakat

yang ingin meningkatkan mutu tenaga pendidik, mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pertumbuhan suatu negara.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang yang menjadi dasar penelitian ini, serta perumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, dan tujuan serta manfaat dari penelitian yang penulis lakukan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab kedua, terdapat *literature review* terkait penelitian-penelitian terdahulu dengan topik yang sama dan berfungsi sebagai acuan penulis dalam penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, terdapat juga landasan teori dan konsep yang menjadi landasan penulis dalam menganalisis penelitian terkait, dan membantu terbentuknya alur pemikiran.

### **BAB III Metode Penelitian**

Pada bab ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, beserta sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait topik pembahasan.

### **BAB IV SDGs dan Upaya Indonesia dan Korea Selatan Dalam Meningkatkan Mutu Tenaga Pendidik Nasional**

Bab ini akan berisi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik nasional masing-masing negara yang berkaitan dengan upaya memenuhi target 4.c SDGs, dengan diawali dengan analisis awal terkait hal-hal yang menyebabkan buruknya mutu tenaga pendidik di Indonesia, lalu dilanjutkan dengan upaya pemenuhan target SDGs di kedua negara. Dalam bab ini akan dibahas berbagai program, maupun kebijakan dalam negeri Indonesia terkait tenaga pendidik.

## **BAB V Analisis Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Upaya Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik**

Bab kelima pada penelitian ini akan membahas hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang pendidikan, khususnya terkait implementasi program pertukaran dan pelatihan tenaga pendidik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik demi memenuhi target 4.c SDGs.

## **BAB VI Penutup**

Bab terakhir pada penelitian ini akan berisi simpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan, serta memberikan saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan terkait upaya peningkatan mutu tenaga pendidik nasional yang dapat memenuhi target 4.c SDGs.